

Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Percepatan Pengendalian dan Kerusakan DAS Citarum Melalui Program Citarum Harum dalam Penanganan Lahan Kritis di Hulu DAS Citarum Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung Tahun 2024-2025

(Evaluation of Government Policy in Efforts to Accelerate Control of Pollution and Damage to The Citarum Harum Watershed Through The Citarum Harum Program in Handling Critical Land in the Hulu of The Citarum Watershed, Kertasari District, Bandung Regency in 2024-2025).

Fania Jamilatul Rahmah ^{1*}, Nandang Alamsyah Deliarnoor ²

^{1,2} Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Indonesia

¹ fania21001@mail.unpad.ac.id*; ² nandang.alamsyah.deliarnoor@unpad.ac.id

* corresponding author: Fania Jamilatul Rahmah

ARTICLE INFO

Article history

Received : June 25, 2025

Revised : December 4, 2025

Accepted : December 12, 2025

Kata Kunci :

Evaluasi kebijakan;
Citarum Harum;
Lahan Kritis;
Kecamatan Kertasari;

Keywords :

Policy Evaluation;
Citarum Harum;
Critical Land;
Kertasari District;



This is an open access
article under the CC-BY-SA license.
Copyright (c) 2025
Transparansi : Jurnal Ilmiah
Ilmu Administrasi

ABSTRACT

Program Citarum Harum merupakan kebijakan strategis yang digagas oleh pemerintah dalam merespons kerusakan di DAS Citarum, khususnya di wilayah hulu Kecamatan Kertasari. Wilayah ini diketahui mengalami perluasan lahan kritis terbesar di Kabupaten Bandung, yang berdampak signifikan terhadap peningkatan risiko bencana lingkungan seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor sehingga mengancam keberlanjutan fungsi Sungai Citarum sebagai sumber kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan dalam penanganan lahan kritis berdasarkan enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil riset menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Citarum Harum telah berhasil merehabilitasi lahan kritis, peningkatan kualitas air dan meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran dan personel, serta distribusi manfaat yang belum merata. Evaluasi pelaksanaan Program Citarum Harum di Kecamatan Kertasari menunjukkan bahwa program ini berhasil pada aspek efektivitas, responsivitas, dan ketepatan. Namun, masih terdapat kelemahan dalam efisiensi, kecukupan, dan pemerataan. Dengan demikian, program ini secara umum dapat dikategorikan berhasil namun belum sepenuhnya optimal. Untuk mengoptimalkan program, perlu penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan jumlah dan produktivitas personel, perluasan cakupan intervensi program, serta integrasi hasil evaluasi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan.

Abstract

The Citarum Harum Program is a strategic policy initiated by the government in response to environmental degradation in the Citarum River Basin, particularly in the upstream area of Kertasari District. This region has experienced the largest expansion of critical land in Bandung Regency, which significantly increases the risk of environmental disasters such as floods, droughts, and landslides—threatening the sustainability of the Citarum River as a vital life source for the community. This study aims to evaluate the policy for managing critical land based on William N. Dunn's six policy evaluation criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The research findings indicate that the implementation of the Citarum Harum Program has succeeded in rehabilitating critical land, improving water quality, and increasing community participation in environmental conservation. However, it still faces challenges such as limited budget and personnel, as well as unequal distribution of benefits. The evaluation of the program in Kertasari District shows success in terms of effectiveness, responsiveness, and appropriateness, while weaknesses remain in efficiency,

adequacy, and equity. Therefore, the program can generally be categorized as successful, though not yet fully optimal. To maximize its outcomes, it is necessary to strengthen cross-sectoral coordination, increase the number and productivity of field personnel, expand the scope of program interventions, and integrate evaluation results as the basis for policy formulation.

PENDAHULUAN

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sekitar 62% wilayah yang terdiri dari laut dan perairan, sehingga pengelolaan sumber daya air menjadi elemen vital dalam pembangunan nasional. Salah satu sungai strategis nasional yang menjadi perhatian pemerintah adalah Sungai Citarum. Sungai Citarum merupakan sungai terpanjang di Jawa Barat dengan panjang 297 km dan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) mencapai 6.822 km². Sungai ini mengalir dari Situ Cisanti di lereng Gunung Wayang, Kabupaten Bandung, dan bermuara ke Laut Jawa di Kabupaten Bekasi, melintasi 13 kota/kabupaten dan menopang kehidupan sekitar 25 juta jiwa. Fungsi sungai ini sangat strategis, mulai dari penyedia air baku (80% untuk DKI Jakarta), pengairan pertanian seluas 328.424 ha, hingga sebagai sumber energi listrik sebesar 2.600 MW dari tiga waduk utama (Saguling, Cirata, dan Jatiluhur).

Di tengah kebermanfaatannya sebagai sungai strategis nasional, Sungai Citarum kini menghadapi kerusakan lingkungan yang parah. Laporan World Bank pada 2018 bahkan menyebutkan Citarum sebagai salah satu sungai terkotor di dunia, dengan indeks kualitas air sebesar 33,43 poin (kategori cemar berat). Pencemaran ini bersumber dari limbah industri, domestik, pertanian, serta berkurangnya Kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan daya dukung ekosistem, peningkatan risiko bencana, serta munculnya lahan kritis yang luas, khususnya di wilayah hulu. Berdasarkan data Bappenas, luas lahan kritis di wilayah DAS Citarum mencapai 884.560 hektar, dengan tingkat erosi berat mencakup 31,4% wilayah.

Penelitian terkait Program Citarum Harum telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk menilai keberhasilan dan tantangan program tersebut. Salah satu penelitian yang diterbitkan dalam *Jurnal Studi Kepemerintahan* tahun 2022 menyoroti efektivitas, efisiensi, dan kecukupan program yang dinilai masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Sementara itu, penelitian lain oleh Nuraini Mutiah melalui skripsinya mengkaji penerapan *collaborative governance* dalam Program Reboisasi Citarum Harum sebagai upaya penanganan lahan kritis di Kecamatan Kertasari. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun program telah berjalan, masih diperlukan penguatan koordinasi dan kerja sama lintas aktor untuk mencapai hasil yang lebih maksimal.

Kawasan hulu DAS Citarum khususnya Kecamatan Kertasari menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Bandung dalam upaya penanganan pencemaran karena merupakan wilayah dengan lahan kritis terluas di Kabupaten Bandung. Penyebab lahan kritis di wilayah ini disebabkan oleh aktivitas alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian dan permukiman, pembalakan liar, serta pengolahan tanah tanpa prinsip konservasi yang memperparah degradasi lingkungan. Lahan kritis ini menimbulkan dampak serius seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, dan penurunan kualitas air.

Untuk merespons permasalahan yang ada di Sungai Citarum, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan, mulai dari Prokasih (1989), Citarum Bergetar (2001), ICWRMIP (2008), hingga Citarum Bestari (2013). Namun, sebagian besar program tersebut dinilai belum mampu mengatasi permasalahan yang ada di DAS Citarum secara menyeluruh akibat penanganan yang tidak mengacu pada karakteristik DAS, bersifat sektoral, dan kurang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Titik balik penanganan terjadi pada tahun 2018, saat Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum. Kebijakan ini melahirkan Program Citarum Harum yang menekankan pendekatan kolaboratif lintas sektor dan wilayah, dengan pelibatan aktif unsur pemerintah, TNI, Polri, BUMN, LSM, dan masyarakat. Salah satu titik lokus program ini berada di Sektor 23, Situ Cisanti, Kecamatan Kertasari, yang merupakan hulu Sungai Citarum. Kawasan ini memiliki luas lahan kritis sekitar 1.307 hektar.

Meskipun capaian program telah mencapai 39.162,58 hektar dari target 80.174,99 hektar lahan kritis (48,84%), masih terdapat kesenjangan antara tujuan dan realisasi. Oleh karena itu, evaluasi

kebijakan menjadi penting untuk menilai sejauh mana Program Citarum Harum telah memenuhi tujuannya. Evaluasi ini perlu dilakukan secara sistematis berdasarkan tiga tahapan kebijakan: formulasi, implementasi, dan dampak, untuk mengetahui efektivitas intervensi dan memperbaiki pendekatan ke depan.

Dalam konteks ini, kerangka evaluasi yang digunakan mengacu pada teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2003), yang mencakup enam kriteria utama yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Citarum Harum dalam mengatasi permasalahan lahan kritis di Kecamatan Kertasari berdasarkan indikator tersebut, guna memberikan kontribusi empiris dan akademis dalam merumuskan strategi pengelolaan DAS yang terintegrasi dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif guna memberikan gambaran lengkap tentang suatu peristiwa atau mengungkap serta menjelaskan fenomena yang terjadi. Penelitian dilakukan secara bertahap, dimulai dari penentuan fokus studi, pengumpulan data, analisis data, hingga penarikan kesimpulan yang mengarah pada pemahaman terhadap dinamika kebijakan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Data dikumpulkan melalui dua jenis sumber, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara dengan sejumlah informan yang terlibat langsung maupun memiliki pengetahuan mengenai pelaksanaan Program Citarum Harum dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yang mana subjek penelitian terlibat langsung dan memiliki pengetahuan terhadap pelaksanaan kebijakan penanganan lahan kritis di wilayah hulu DAS Citarum. Dalam penelitian ini, terdapat empat informan kunci yang dipilih untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan Program Citarum Harum di wilayah hulu. Informan tersebut meliputi Koordinator Sekretariat Satgas Citarum, Bintara Seksi Operasi Citarum Harum Sektor 23, staf Dinas Pertanian Kabupaten Bandung yang juga berperan sebagai naradamping Sektor 23 Citarum Harum, serta perwakilan masyarakat Kecamatan Kertasari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menilai sejauh mana Program Citarum Harum dapat berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan evaluasi kebijakan yang sistematis dan berbasis teori. Dalam konteks ini, pendekatan evaluasi yang dikembangkan oleh William N. Dunn menjadi kerangka konseptual yang relevan. Dunn mengajukan enam kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan Program Citarum Harum dalam penanganan lahan kritis dengan realitas implementasi di lapangan, serta menyediakan landasan empiris bagi perumusan strategi perbaikan yang lebih adaptif dan kontekstual. Setiap kriteria evaluasi akan dianalisis secara mendalam berdasarkan pada data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi selama pelaksanaan penelitian.

Evaluasi Kebijakan Berdasarkan Kriteria Efektivitas

Kriteria efektivitas dalam evaluasi kebijakan publik merujuk pada sejauh mana tujuan normatif dari suatu program dapat tercapai melalui pelaksanaan intervensi yang telah dirancang. Dalam konteks Program Citarum Harum, efektivitas diukur berdasarkan keberhasilan program dalam mengurangi luas lahan kritis, meningkatkan Indeks Kualitas Air (IKA), memperbaiki kualitas ekosistem, pengurangan risiko terjadinya bencana alam serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, khususnya di sekitar DAS Citarum. Hal ini menjadi relevan mengingat tujuan utama dari penanganan lahan kritis melalui Program Citarum Harum adalah untuk meningkatkan kualitas Sungai Citarum dan mencegah terjadinya sedimentasi sungai yang dapat memperparah degradasi lingkungan dan menghambat fungsi hidrologis wilayah tersebut.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Citarum Harum di Kecamatan Kertasari telah menghasilkan capaian yang cukup signifikan. Dari total target rehabilitasi lahan seluas 1.307 hektar, telah terealisasi sekitar 95%, mencerminkan adanya kemajuan nyata dalam upaya penanganan lahan kritis. Selain penurunan luas lahan kritis, Program Citarum Harum kini telah berhasil

peningkatan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) secara konsisten dari tahun 2018 hingga 2024 menunjukkan perbaikan kualitas lingkungan akuatik, yang menjadi salah satu indikator utama keberhasilan program dalam aspek ekologis.



Gambar 1. 1 IKA DAS Citarum
Sumber: Satgas Citarum

Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan penanaman pohon, konservasi lahan, dan pengelolaan bantaran sungai juga menjadi faktor pendukung penting bagi keberhasilan program. Keterlibatan masyarakat bukan hanya mencerminkan penerimaan terhadap program, tetapi juga menandakan adanya transformasi perilaku menuju pola hidup yang lebih ramah lingkungan, menjadi sebuah bentuk efektivitas non-material yang sangat krusial dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, efektivitas program masih menghadapi sejumlah tantangan yang bersifat struktural dan sistemik. Kurangnya dukungan teknis dari pemerintah daerah dan lambannya koordinasi lintas sektor menyebabkan keterlambatan respons terhadap kebutuhan di lapangan. Selain itu, berakhirnya masa kontrak fasilitas alat berat menyebabkan stagnasi dalam upaya penanganan sedimentasi dan pengangkutan sampah, sehingga menurunkan daya dukung operasional program. Evaluasi ini menegaskan bahwa efektivitas tidak hanya diukur dari pencapaian output, tetapi juga dari keberlanjutan dukungan sumber daya serta integrasi antar-lembaga yang mendorong pencapaian tujuan jangka panjang secara konsisten.

1. Evaluasi Kebijakan Berdasarkan Kriteria Efisiensi

Kriteria efisiensi dalam evaluasi kebijakan menitikberatkan pada hubungan antara input (sumber daya yang digunakan) dan output (hasil yang dicapai), serta sejauh mana kebijakan mampu menghasilkan manfaat maksimal dengan biaya minimal. Dalam implementasinya, efisiensi menjadi isu yang krusial dalam pelaksanaan Program Citarum Harum di Kecamatan Kertasari. Meskipun program ini melibatkan berbagai Lembaga termasuk peran aktif dari TNI, Satgas Citarum Harum dan lainnya, hasil penelitian menunjukan bahwa kapasitas tenaga kerja telah menurun drastis. Jumlah personel lapangan yang semula mencapai 400–500 orang, kini hanya tersisa sekitar 50 orang. Penurunan ini menyebabkan ketidakseimbangan antara beban kerja yang besar dan ketersediaan sumber daya manusia, yang berdampak pada melambatnya proses rehabilitasi lahan, kurang optimalnya pemeliharaan, serta penurunan intensitas pemantauan lapangan.

Efisiensi program juga terganggu oleh keterbatasan anggaran, terutama dalam aspek pengadaan bibit tanaman. Pada tahun 2025, tidak tersedia alokasi anggaran pusat untuk penyediaan bibit, memaksa Satgas untuk melakukan pembibitan secara mandiri. Meskipun langkah ini menunjukkan inisiatif lokal yang kreatif, hal tersebut tidak cukup untuk menutupi kekurangan secara skala besar. Akibatnya, luasan lahan yang dapat direhabilitasi menjadi terbatas, dan efektivitas program dalam jangka panjang pun terancam.

Secara keseluruhan, ketidakseimbangan antara kapasitas dan kebutuhan sumber daya baik manusia, finansial, maupun logistik menyebabkan turunnya efisiensi pelaksanaan program. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi penguatan kelembagaan berupa peningkatan alokasi anggaran,

rekrutmen dan pelatihan tenaga kerja, serta pembentukan sistem koordinasi lintas sektor yang lebih solid untuk memastikan bahwa seluruh komponen program berjalan dengan harmonis dan efisien.

2. Evaluasi Kebijakan Berdasarkan Kriteria Kecukupan

Kecukupan, sebagai salah satu kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn, menilai sejauh mana sebuah program mampu menjawab masalah inti yang menjadi latar belakang kebijakan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Program Citarum Harum diharapkan mampu memberikan solusi komprehensif terhadap kompleksitas permasalahan di Kecamatan Kertasari, khususnya mengenai permasalahan lingkungan dan penanganan lahan kritis di wilayah hulu DAS Citarum yang belum sepenuhnya mencapai outcome Program Citarum Harum. Program Citarum Harum ini telah memberikan sejumlah kontribusi positif, seperti menurunnya intensitas banjir dan longsor, meningkatnya daya tangkap air tanah, serta adopsi praktik pertanian berkelanjutan melalui sistem tumpang sari. Strategi konservasi lahan dengan pendekatan ekosistem dan partisipasi masyarakat dinilai sebagai langkah adaptif yang memperkuat dimensi sosial dan ekologis dari program.

Selain memberikan dampak ekologis, Program Citarum harum juga bertujuan untuk memberikan solusi terhadap persoalan sosial ekonomi masyarakat pemilik lahan luas di kawasan hutan yang sebelumnya mendorong alih fungsi hutan menjadi area perkebunan. Upaya penghijauan dan perubahan perilaku masyarakat yang sebelumnya melakukan deforestasi untuk perkebunan menjadi lebih sadar terhadap pentingnya keberlanjutan hutan dan daerah tangkapan air, yang menjadi indikator bahwa program ini mampu menjangkau aspek mendasar dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Kriteria kecukupan dalam konteks ini mengacu pada sejauh mana kebijakan mampu menyelesaikan masalah inti secara menyeluruh, tidak hanya secara parsial, Temuan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan yang cukup serius yang mengindikasikan belum tercapainya kecukupan kebijakan secara penuh. Salah satu permasalahan krusial adalah tingginya volume limbah peternakan dan sampah domestik yang tidak terkelola dengan baik yang menyebabkan parameter bakteriologis, khususnya koli dalam pengukuran IKA. Permasalahan tingginya volume limbah peternakan dan sampah domestik yang belum tertangani secara optimal dalam Program Citarum Harum menunjukkan bahwa dimensi pencemaran tidak hanya berasal dari faktor fisik lahan, tetapi juga dari limbah biologis dan antropogenik yang belum terintegrasi dalam skema penanganan program secara menyeluruh.

Dengan demikian, meskipun Program Citarum Harum telah berhasil dalam banyak aspek teknis dari perspektif kecukupan, program ini belum mampu menjawab secara komprehensif seluruh akar permasalahan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan kualitas air dan pengelolaan limbah di wilayah hulu khususnya di Kecamatan Kertasari. Oleh karena itu, untuk memenuhi kriteria kecukupan menurut Dunn, program ini masih membutuhkan intervensi lanjutan dan penguatan dari sisi regulasi dan pengawasan untuk memastikan bahwa solusi yang diberikan benar-benar cukup dalam menyelesaikan masalah utama secara keseluruhan.

3. Evaluasi Berdasarkan Kriteria Pemerataan

Kriteria pemerataan dalam evaluasi kebijakan merujuk pada sejauh mana distribusi manfaat dan akses terhadap kebijakan publik diberikan secara adil kepada seluruh kelompok sasaran, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis. Dalam pelaksanaan Program Citarum Harum di Kecamatan Kertasari, prinsip ini diupayakan oleh satgas melalui penyebaran intervensi ke seluruh wilayah yang menjadi prioritas dalam upaya perbaikan lingkungan di Daerah Aliran Sungai Citarum, termasuk desa-desa terpencil dan daerah yang secara geografis sulit diakses, seperti dataran tinggi Artapela. Kawasan ini diprioritaskan karena tingkat degradasi lingkungannya yang tinggi serta lokasinya yang berkontribusi signifikan terhadap aliran air ke pemukiman warga. Upaya tersebut mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa pemberian manfaat program tidak bersifat diskriminatif, melainkan inklusif terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Intervensi tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah yang lebih mudah dijangkau, seperti pusat kecamatan atau daerah dengan infrastruktur memadai, tetapi juga menjangkau komunitas yang

berada di daerah pinggiran maupun pelosok. Dengan demikian, seluruh masyarakat baik yang tinggal di kawasan pusat, daerah penyangga, maupun wilayah pedesaan memiliki hak, akses, dan peluang yang setara dalam memperoleh manfaat dari pelaksanaan program. Hal ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keadilan distribusional dalam kebijakan publik, sebagaimana ditegaskan dalam teori pemerataan oleh William N. Dunn. Namun demikian, meskipun secara konseptual distribusi manfaat Program Citarum Harum telah dirancang untuk menjangkau seluruh wilayah, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya permasalahan seperti keterbatasan alokasi anggaran dan terhentinya pasokan bibit yang mengakibatkan permintaan masyarakat tidak dapat terpenuhi secara merata. Ketiadaan bibit yang memadai serta keterbatasan pendanaan menyebabkan kelompok masyarakat di wilayah terpencil, seperti dataran tinggi Artapela, menerima intervensi yang lebih sedikit dibandingkan daerah yang dekat dengan pusat kecamatan atau memiliki jaringan institusional lebih kuat. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya tenaga kerja dan sarana pendukung, terutama di Sektor 23, yang mengakibatkan disparitas dalam pelaksanaan pengawasan, penanaman, dan pemeliharaan lahan antar kawasan.

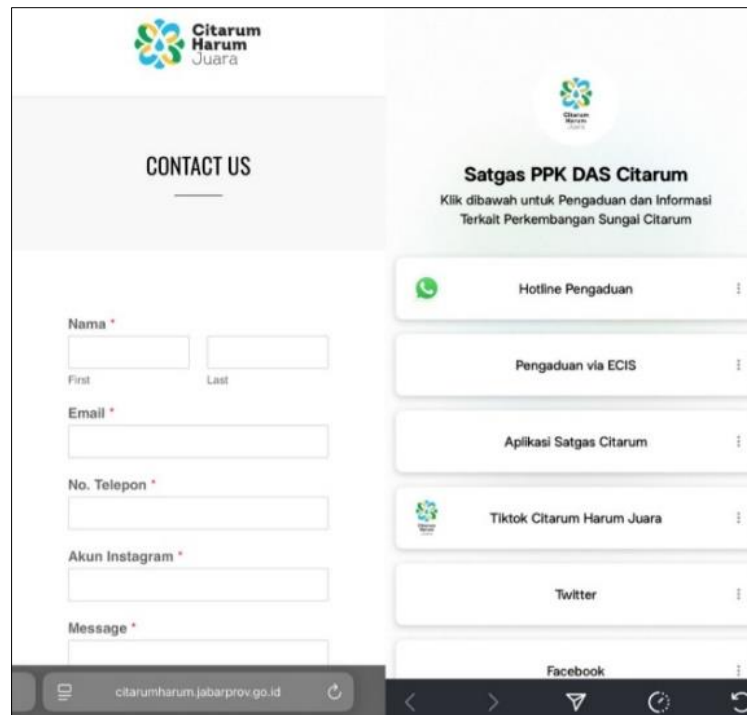
Melihat kondisi tersebut, dalam perspektif teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, kriteria pemerataan dalam Program Citarum Harum belum sepenuhnya terpenuhi. Walaupun terdapat upaya nyata dari Satgas untuk menjangkau area-area sulit seperti Artapela dengan pendekatan non-diskriminatif, kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya tantangan mendasar dalam bentuk kesenjangan distribusi manfaat. Hambatan struktural berupa pasokan bibit yang tidak berkelanjutan, keterbatasan anggaran, serta kekurangan tenaga kerja telah menyebabkan ketimpangan yang nyata antara wilayah yang secara geografis dan institusional lebih kuat dengan wilayah yang lebih rentan secara ekologis.

Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar pemerataan, karena kelompok masyarakat yang berada di lokasi dengan input kebijakan yang terbatas justru harus menanggung risiko lingkungan yang lebih besar. Oleh karena itu, perlu diterapkan sistem pemantauan pemerataan yang lebih komprehensif, dengan menggunakan indikator capaian berbasis wilayah yang mengukur proporsi manfaat secara substansial, bukan sekadar jumlah output keseluruhan agar distribusi manfaat program benar-benar mencerminkan prinsip pemerataan sesuai dengan mandat evaluasi kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial.

4. Evaluasi Berdasarkan Kriteria Responsivitas

Kriteria responsivitas mengacu pada sejauh mana suatu kebijakan mampu merespons kebutuhan aktual, aspirasi, serta perubahan kondisi masyarakat secara adaptif dan relevan. Dalam hal ini, William N. Dunn menekankan bahwa kebijakan yang responsif harus mampu merespons kebutuhan dan preferensi kelompok yang terdampak, khususnya bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Kertasari. Berdasarkan hasil wawancara bersama Wakil Sekretariat Satgas Citarum, perumusan Program Citarum Harum sejak awal telah didasarkan pada identifikasi masalah yang tepat, yaitu pencemaran air Sungai Citarum, degradasi lahan kritis, pengelolaan limbah peternakan yang belum optimal, serta rendahnya tingkat kesadaran lingkungan masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Hasil temuan tersebut kemudian dijabarkan menjadi dua belas agenda intervensi yang berbeda-beda fokusnya di sektor hulu, tengah, maupun hilir, sehingga masing-masing instansi pelaksana memiliki ruang adaptasi sesuai karakteristik lokalnya.

Tingkat responsivitas tersebut semakin nyata dalam praktik, khususnya di Kecamatan Kertasari, di mana kebijakan dijalankan dengan pendekatan kontekstual dan terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak. Salah satu contoh konkret dari respons adaptif ini adalah pengembangan sistem pembibitan mandiri oleh Satgas sebagai solusi atas keterbatasan anggaran pengadaan bibit pada tahun 2025. Inovasi ini tidak hanya berfungsi sebagai strategi efisiensi anggaran, tetapi juga mempercepat proses distribusi bibit sesuai dengan kebutuhan musim tanam masyarakat.



Gambar 1. 2 Hotline Pengaduan Citarum Harum
Sumber: Satgas Citarum

Selain itu, Program Citarum Harum juga membuka berbagai saluran komunikasi dua arah yang efektif, seperti hotline pengaduan di situs resmi citarumharum.jabarprov.go.id, grup WhatsApp, forum musyawarah, serta pertemuan koordinasi yang difasilitasi langsung oleh Satgas di lapangan. Saluran-saluran ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan, saran, maupun kebutuhan secara langsung, dan memastikan bahwa kebijakan tidak hanya berjalan secara top-down, melainkan juga bersifat partisipatif dan dialogis.

Dengan demikian, Program Citarum Harum dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang responsif karena tidak hanya adaptif terhadap keterbatasan struktural, tetapi juga tanggap terhadap preferensi dan kebutuhan lokal masyarakat secara nyata dan berkelanjutan. Temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa masyarakat merasa didengar dan kebutuhan mereka direspons secara konkret oleh Satgas. Hal ini mengindikasikan bahwa Program Citarum Harum tidak hanya menjalankan kebijakan secara formal, tetapi juga membuka ruang partisipatif yang memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan. Dalam kerangka teori evaluasi Dunn, capaian ini menandakan bahwa kebijakan memiliki tingkat responsivitas yang tinggi terhadap dinamika sosial dan kebutuhan lokal.

5. Evaluasi Berdasarkan Kriteria Ketepatan (Appropriateness)

Kriteria ketepatan kebijakan merujuk pada sejauh mana solusi yang diterapkan benar-benar relevan terhadap permasalahan yang dihadapi, serta apakah kebijakan tersebut merupakan alternatif terbaik dibandingkan opsi lainnya. Ketepatan dalam penelitian ini membahas mengenai apakah program ini benar-benar tepat untuk menyelesaikan masalah luasnya lahan kritis di wilayah hulu DAS Citarum atau apakah ada solusi yang lebih baik yang dirasakan secara positif oleh masyarakat..

Berdasarkan hasil wawancara dengan Babinsa Sektor 23, program ini dinilai memberikan dampak positif yang signifikan, ditandai dengan mulai membaiknya kualitas air sungai, meningkatnya stabilitas lahan, serta terbukanya akses terhadap bibit tanaman melalui skema pemberdayaan. Penerapan sistem tumpang sari menjadi salah satu pendekatan yang tepat, karena tidak hanya mendukung rehabilitasi lingkungan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial ekonomi masyarakat, memungkinkan mereka tetap menjalankan kegiatan pertanian sembari berkontribusi terhadap pelestarian lahan.

Lebih lanjut, ketepatan kebijakan juga tercermin dari strategi padat karya yang diterapkan oleh Satgas untuk mengatasi kendala keterbatasan tenaga kerja. Melalui perekrutan tenaga lokal, strategi ini terbukti efektif dalam menekan biaya logistik, meningkatkan efisiensi pelaksanaan di lapangan, dan memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap program. Alih-alih mendatangkan pekerja dari luar daerah, pelibatan warga sekitar sebagai tenaga kerja lapangan tidak hanya mempercepat rehabilitasi lahan, tetapi juga menambah pendapatan masyarakat, sehingga manfaat program menjangkau dimensi ekonomi lokal. Selain itu, respons manajerial yang adaptif juga terlihat melalui inovasi penyemaian bibit secara mandiri sebagai jawaban atas keterbatasan anggaran. Upaya ini menunjukkan ketepatan kebijakan yang mampu beradaptasi terhadap hambatan struktural tanpa mengorbankan tujuan utama, sekaligus memperkuat relevansi ekologis program.



Gambar 1. 3 Penyemaian Bibit Mandiri Oleh Satgas
Sumber: Olahan Peneliti 2025

Ketepatan Program Citarum Harum juga diperkuat dengan pendekatan sosialisasi yang intensif dan langsung menyentuh masyarakat. Kegiatan ini berhasil mengubah pola pikir warga dari yang awalnya pasif menjadi lebih proaktif dalam menjaga lingkungan. Bukti nyata keberhasilan ini tampak dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengajuan bibit, pelaksanaan penanaman, hingga keterlibatan dalam pemeliharaan lahan secara sukarela. Strategi ini tidak hanya meningkatkan penerimaan sosial, tetapi juga membangun keterlibatan aktif masyarakat yang menjadikan kebijakan ini bagian dari praktik sosial sehari-hari. Masyarakat yang sebelumnya bersikap skeptis kini menunjukkan antusiasme tinggi terhadap pelestarian lingkungan, yang menandakan bahwa kebijakan ini tidak hanya tepat secara administratif, melainkan juga tepat sasaran secara sosial dan kultural.



Gambar 1. 4 Kegiatan Sosialisasi Satgas Citarum
Sumber: Olahan Peneliti 2025

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Program Citarum Harum dalam penanganan lahan kritis di Kecamatan Kertasari telah memenuhi unsur ketepatan sebagaimana dirumuskan oleh Dunn. Hal ini tercermin melalui keselarasan antara tujuan program dengan kebutuhan lokal, pendekatan kebijakan yang memperhitungkan aspek sosial-ekonomi, fleksibilitas strategi Satgas dalam menghadapi keterbatasan, serta keberhasilan dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat. Program ini tidak hanya menawarkan solusi teknis atas permasalahan ekologis, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga layak dikategorikan sebagai kebijakan yang tepat guna dan tepat sasaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian yang dilaksanakan peneliti, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Citarum Harum dalam penanganan lahan kritis di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, menunjukkan capaian yang cukup signifikan, meskipun belum sepenuhnya optimal. Dari kriteria efektivitas, program ini mampu merehabilitasi sekitar 95% dari total target 1.307 hektar lahan kritis, memperbaiki kualitas air, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Namun demikian, pencapaian tersebut masih dibatasi oleh lemahnya koordinasi antarinstansi dan minimnya sarana pendukung di lapangan.

Ditinjau dari kriteria efisiensi, pelaksanaan program mengalami hambatan akibat keterbatasan personel dan anggaran, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara luas wilayah yang harus ditangani dan sumber daya yang tersedia, yang pada akhirnya berdampak pada tidak optimalnya rasio input-output. Dari kriteria kecukupan, meskipun terdapat kontribusi terhadap perbaikan kondisi lingkungan, program belum mampu menangani secara menyeluruh persoalan yang kompleks seperti pencemaran dari limbah domestik dan peternakan. Dalam kriteria pemerataan, distribusi manfaat program belum merata, terutama di wilayah-wilayah terpencil seperti Artapela yang masih menghadapi hambatan akses dan keterbatasan tenaga lapangan.

Meskipun demikian, pada kriteria responsivitas program menunjukkan kapasitas adaptif yang tinggi melalui keterlibatan aktif masyarakat serta inovasi lokal seperti pembibitan mandiri yang lahir dari keterbatasan anggaran. Selanjutnya, dari kriteria ketepatan, pendekatan yang digunakan seperti sistem tumpang sari, padat karya, dan penyuluhan terbukti relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Program Citarum Harum dalam penanganan lahan kritis telah menunjukkan kinerja yang kuat dalam kriteria efektivitas, responsivitas, dan ketepatan, namun masih perlu peningkatan signifikan pada aspek efisiensi, kecukupan, dan pemerataan untuk mencapai keberhasilan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Firyal., & Kurniati, Widya. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia). Gorontalo: Ideas Publishing.
- Akbar, H., & Dwiyanto, Y. (2022). Upaya Mencapai SDGs Poin Keenam (Air Bersih dan Sanitasi Layak): Program Citarum Harum 2018-2022 di Kabupaten Bandung. *Jurnal Academia Praja*, 7(2), 20-21.
- Andri, Yayan., Aziz, Abdul, Mulyana, Yaya. (2021). Strategi Kebijakan Lingkungan Program Citarum Harum Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, 3(2), 115-116.
- Gewati, M. (2021, November 3). Jadi Sungai Terkotor di Dunia Tahun 2018, Citarum Kini Membaik dengan Status Cemar Ringan. *Kompas*.
- Halimatusadiah, S., Dharmawan, Hadi., & Mardiana, R. (2012). Efektivitas Kelembagaan Partisipatoris Di Hulu Daerah Aliran Sungai Citarum. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(1), 71-72.
- Herdiansah, Ganjar., & Simajuntak, Sabar. (2017). Peran Dan Fungsi Pembinaan Teritorial TNI AD Dalam Perbantuan Pemerintah Daerah: Studi Di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 74-75.
- Imansyah, F. (2012). Studi Umum Permasalahan dan Solusi DAS Citarum Serta Analisis Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Sositologi*, Edisi 25 tahun, hal 24-26.
- Krisandi Tuhehay, K., Gosal, H., & Mononimbar, W. (2019). Analisis Tingkat Lahan Kritis Berbasis SIG (Sistem Informasi Geografis) (Studi Kasus: Kecamatan Amurang, Kecamatan Amurang Timur, Kecamatan Amurang Barat, Dan Kecamatan Tumpaan). *Jurnal Spasial*, 6(3), 746-747.
- Lestari, E., & Hidayawanti, R. (2016). Perencanaan Pengelolaan DAS Terpadu dalam Mengatasi Ketidakseimbangan Kebutuhan Air Bersih dan Permasalahan Banjir (Kajian Daerah Aliran Sungai Cisadane). *Jurnal Forum Mekanika*, 5(2), 76.

- Solihah, R. (2020). Perencanaan Partisipatif Dalam Program Citarum Harum Di Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. *Jurnal UNPAD*, 3(1), 36-37.
- Muadifah, Afidatul. (2019). Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Malang: Media Nusa Creative.
- Nurbaya, F., & Puspito, D. (2023). Parameter Air Dan Udara Serta Uji Kualitas Air Sungai. Cirebon: PT Arr Rad Pratama
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.
- Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan DAS Citarum 2019-2025.
- Warman., Komariyah, L., & Kaltsum, U. (2023). Konsep Umum Evaluasi Kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, vol 3, 26-27.
- Zuhaldi., Pitono, A., & Wargadinata, L. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kawasan Citarum Harum di Kabupaten Bandung. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1), 1245.